

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, yang dihuni oleh bermacam-macam ras, suku, dan etnis yang berbeda-beda. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki keunggulan, termasuk potensinya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi bidang kepariwisataan. Dengan banyaknya potensi alam yang dimiliki, akan menarik banyak wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia dan memberikan keuntungan bagi Negara. Pariwisata seringkali dipandang sebagai sektor yang sangat penting dalam ekonomi dunia. Sektor tersebut berkembang atau mundur maka banyak negara akan terpengaruh secara ekonomis. Pembangunan kepariwisataan mulai diperhatikan oleh pemerintah daerah dan dipandang memiliki potensi yang baik untuk mendorong percepatan kesejahteraan lokal. Oleh sebab itu dalam perkembangannya, sektor pariwisata ini mampu berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.¹

Semua daerah di Indonesia saat ini berlomba-lomba menarik perhatian wisatawan dengan keunggulan pariwisata daerahnya masing-masing. Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemerintah untuk memperoleh devisa, selain itu pariwisata juga mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah, yaitu: memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, memperluas wawasan

¹ James J. Spillane. 1994. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 36.

nusantara, mendorong perkembangan daerah, mendorong pelestarian lingkungan hidup, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Pengembangan daerah wisata diharapkan bisa menimbulkan perubahan-perubahan sosial di kalangan masyarakat setempat. Dalam suatu daerah, perkembangan pariwisata bisa juga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kebudayaan masyarakat setempat. Positif, jika pembangunan itu bisa merangsang perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya mereka sendiri. Negatifnya, jika pengembangan wisatanya bisa melunturkan nilai-nilai budaya yang sudah ada karena penduduknya lebih terangsang untuk mengadopsi nilai-nilai budaya asing tanpa menghayati esensinya.²

Daerah juga merupakan bagian dari suatu wilayah sebagai teritorial yang ditentukan atas pengertian, batasan dan wewenang administratif yang didasarkan pada perundang-undangan. Pada era otonomi saat ini, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 menjelaskan bahwa Daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri. Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya regulasi dan kebijakan tersebut, maka setiap pemerintah daerah sedang gencar membangun daerahnya melalui potensi yang dimiliki. Salah satunya membangun potensi sektor wisatanya. Dengan beragamnya potensi yang dimiliki, maka setiap Pemerintah Daerah membagi urusan Pemerintahannya masing-masing.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 9 disebutkan bahwa urusan Pemerintah Daerah dibagi menjadi tiga bagian, yakni

² Dr. James J. Spillane. 1985. *Ekonomi Pariwisata*. Yogyakarta: hlm 55

Urusan Pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah ini berfungsi untuk mengelompokkan urusan pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Pada era otonomi Daerah saat ini, Pemerintah Daerah secara nyata harus dapat melaksanakan kewenangannya untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini berpedoman pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan wajib pemerintah ini harus dilaksanakan secara penuh dan dalam bentuk kebijakan dan program pemerintah daerah. Bentuk kebijakan dan program dalam urusan wajib pemerintah adalah pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Berbeda dengan urusan pilihan pemerintah, urusan pilihan pemerintah hanya berlaku bagi daerah-daerah yang memiliki potensi-potensi tertentu.

Melalui urusan pilihan dan urusan wajib, selayaknya pemerintah daerah dapat membangun daerahnya dengan berbagai potensi yang dimiliki, salah satunya pada pengelolaan sektor pariwisata. Pariwisata adalah salah satu faktor terpenting dalam menunjang pengembangan suatu daerah, karena dengan berkembangnya pariwisata di daerah, akan berpengaruh besar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, disebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata juga merupakan suatu daerah tujuan wisata yang akan

dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi dengan tidak mengesampingkan aspek sosial budaya.³

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata dan budaya berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu juga dinas pariwisata mempunyai fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata dan Pembinaan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pada umumnya pengembangan pariwisata bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek serta daya Tarik wisata. Pembangunan pariwisata pada hakekatnya merupakan upaya untuk membawa *state of the art system* kepariwisataan yang satu menuju kepariwistaan yang lain yang dipandang lebih mampu atau lebih baik melalui perencanaan atau dengan memperhatikan perubahan konfigurasi yang terjadi.⁴

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, pariwisata adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. Contohnya salah satu daerah di Provinsi Maluku, lebih tepatnya di Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten ini adalah daerah yang mempunyai sektor wisata yang amat indah dan

³ Wayan Suteja dan Ida Bagus Sruyawan dalam Yoeti Oka A (2000), *Pengembangan Pelabuhan Cruise Tanah Ampo Sebagai Gerbang Pariwisata Kabupaten Karangasem*, Jurnal Destinasi Pariwisata/Vol.II/No.2/Tahun 2014, Hal 51.

⁴ A. Reni Widyastuti. *Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan*, Jurnal EKOSAINS/Vol.II/No.3/Oktober 2010, Hal. 72,73.

masih dalam proses pengembangan guna menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Buru Selatan.

Kabupaten Buru Selatan adalah Kabupaten yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buru. Daerah yang baru diresmikan ini mempunyai banyak potensi di wisata baharinya dan juga hasil alamnya yang tidak kalah dari daerah-daerah di Maluku. Secara umum Kabupaten Buru Selatan memiliki 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kepala Madan dengan Ibukota biloro, Kecamatan Leksula dengan Ibukota Leksula, Kecamatan Namrole dengan Ibukota Namrole, Kecamatan Waesama dengan Ibukota Wamsisi, dan Kecamatan Pulau Ambalau dengan Ibukota Wailua, komposisi Penduduk Buru Selatan yang berjumlah 60.327 jiwa pada tahun 2016, yang terdiri dari orang-orang asli penghuni Pulau Buru kemudian penduduk yang berasal dari Pulau Ambalau dan Penduduk pendatang yang kebanyakan berasal dari etnis Buton, Bugis dan dari Penduduk asli Kota Ambon.⁵

Kabupaten Buru Selatan memiliki beberapa tempat wisata Pantai, Pulau dan Sungai yang menjadi daya tarik wisatawan yang sedang mengunjungi Kabupaten Buru Selatan, sementara terdapat 6 tempat tujuan wisata diantaranya: Pulau Oki, Pantai Wamsoba, Pantai Masnana, (Sungai) Air Babunyi, (Sungai) Air Jin dan Pulau Tomoho. Dari keenam tempat wisata tersebut, Pantai Wamsoba di Desa Wali yang menjadi sektor wisata unggulan yang ada di Kabupaten Buru Selatan. Wisata bahari yang terdapat di Kabupaten Buru selatan ini sangat baik untuk tempat berkumpul

⁵ <http://www.kemendagri.go.id/profil-daerah/kabupaten.maluku.buru-selatan> (11 jun 2018 pkl 22.15)

keluarga. Selain itu wisata bahari juga digunakan untuk memperkenalkan pada generasi muda bahwa alam sangatlah penting untuk dilestarikan sekaligus mengajarkan rasa syukur kepada generasi muda. Hasil alam yang di hasilkan dari Kabupaten Buru Selatan ini yaitu Perkebunan Coklat, Perkebunan Cengkeh, dan Perkebunan Sawah. Selain wisata bahari dan alamnya, Kabupaten Buru Selatan juga masih mempunyai adat yang masih kental disekitar daerahnya. Keda, istilah yang dipakai untuk masyarakat asli Kabupaten Buru, meraka, yang masih membuat adat dan budaya Buru masih terasa hingga sekarang.

Untuk memperkenalkan pariwisata Kabupaten Buru Selatan, dalam hal ini pemasaran sangat berperan penting untuk wisatawan atau traveler, agar dapat mengetahui kondisi dan tempat wisata yang ada di Kabupaten Buru selatan. Dalam hal kepariwisataan, pemasaran sektor wisata sangat dibutuhkan untuk menawarkan tempat wisata khususnya di Kabupaten Buru Selatan, Hal ini dibutuhkan untuk menarik peminat atau wisatawan dari berbagai Negara, yang bertujuan untuk menambah pendapatan Daerah. Strategi pemasaran wisata adalah kreativitas mengkomunikasikan keunggulan produk wisata terhadap sasaran, strategi pemasaran yang baik dan cocok akan memberikan pengaruh yang baik bagi kepariwisataan dalam menarik wisatawan yang berkunjung dan sebaliknya strategi pemasaran yang kurang terhadap pariwisata akan berdampak pada penurunannya wisatawan yang berkunjung. Hal ini juga dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Bab 4 Pasal 7 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan

Peraturan Daerah tersebut munculah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang akan dikerjakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buru Selatan.

Tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Buru Selatan dalam melakukan pemasaran destinasi pariwisata. Dinas Pariwisata masih belum mengoptimalkan pemasaran pariwisata dengan baik sehingga wisatawan belum mengetahui mengenai pariwisata Buru Selatan, Dinas Pariwisata masih bergantung pada website pemasaran PEMPROV yang dimana pada website Pemprov ini tidak hanya menampilkan pariwisata Buru Selatan saja tetapi juga menampilkan seluruh destinasi pariwisata daerah-daerah di Maluku sehingga agak sulit untuk wisatawan dapat mengetahui ciri khas dari destinasi wisata yang ada di Kabupaten Buru Selatan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pemasaran pariwisata di Kabupaten Buru Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, muncul masalah-masalah yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pemasaran pariwisata di Kabupaten Buru Selatan?
2. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pemasaran pariwisata di Kabupaten Buru Selatan?

C. Tujuan penelitian

Masih mengacu pada rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Buru Selatan dalam mengelola pemasaran pariwisata yang dimiliki.
2. Mengetahui apa yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pemasaran pariwisata Kabupaten Buru Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakakan sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya dalam Peningkatan dan Pengelolaan di bidang ilmu Pemerintahan tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Buru Selatan.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam mempraktekkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan

serta bermanfaat untuk melatih diri dengan cara mengembangkan serta memperluas wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan.

Serta untuk Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Buru Selatan, semoga hasil penelitian ini dapat membantu memberikan masukan dan informasi terkait pengelolaan pemasaran pariwisata daerah.

E. Definisi Konseptual Dan Oprasional

1. Definisi Konseptual

Konsep adalah istilah untuk memberikan penegasan tentang makna dan arti kata yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu, Dengan adanya penegasan arti kata akan mempermudah dalam memahami maksud yang tercantum dalam penelitian. Menurut Bailey didalam bukunya, sebagai presepsi (mental image) atau abstraksi yang dibentuk dengan menarasikan hal-hal khusus dalam sebuah penelitian yang tentunya memiliki konsep dasar guna memberikan batasan-batasan yang berkaitan dengan konsep dasar dala penelitian ini.⁶ Ada beberapat konsep yang di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara umum merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk

⁶ Iqbal Hasan,2004, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Hal 71.

melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam pendapat yang dikemukakan Thomas R. Dye (1978) Mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do.*”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.⁷

Dari penjelasan diatas bisa dipahami bahwasannya kebijakan publik dikatakan sebagai suatu arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mencapai tujuan tertentu dan mengatasi suatu permasalahan yang dilaksanakan pada ruang lingkup tertentu yang dimana didalamnya terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan.

⁷ Ismail Nawawi, 2009, *Public Policy*. Surabaya: ITS Press. Hlm 8

Pemerintah selaku yang memiliki kewenangan dituntut bisa memberikan kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang pasti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga nantinya memberikan dampak yang baik pada masyarakat.

b. Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III (1980), yang dimana beliau menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Ditegaskan juga olehnya bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan dari pembuat kebijakan atau kebijakannya tidak bisa berjalan sukses.⁸ Implementasi kadang tidak berjalan sesuai dengan suksesnya kebijakan atau inefektifitas implementasi kebijakan publik biasanya karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga dalam pemerintahan maupun koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan melalui komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan target atau kelompok sasaran sehingga nantinya jika kelompok sasaran sudah memahami kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, efektifitas dari implementasi diperkirakan akan menjadi lebih baik.

Dari penjelasan diatas bisa dipahami bahwa keberhasilan suatu kebijakan bisa dilihat dari berhasil tidaknya pengimplementasian seperti yang dikatakan sebelumnya, tetapi implementasi kebijakan tidak hanya bisa

⁸ Riant, Nugroho. 2014. *Op.cit.* Hlm 673

dipandang dari bagaimana perumusan yang bisa dikatakan baik tetapi juga tentang bagaimana pelaksanaannya, dimana setiap jajaran yang terlibat dalam suatu kebijakan juga saling berkoordinasi agar implementasi menjadi lebih baik. Target dari kebijakan juga merupakan faktor yang bisa menentukan bagaimana suatu implementasi kebijakan bisa berhasil atau tidak, target kebijakan yang dimaksudkan ialah kelompok sasaran yang nantinya akan merasakan hasil dari kebijakan tersebut.

c. Pengelolaan

Menurut Drs. Winarno Hamiseno pengelolaan adalah substantif dari mengelola. Sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian.⁹ Mengacu pada uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan rangkaian prosedur sampai mendapatkan hasil. Sehingga pengelolaan yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Pengelolaan dilakukan agar potensi wisata yang ada dapat berkembang serta mampu mencapai tujuan yang diinginkan yaitu dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.

2. Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variable yang di observasi dapat diukur. Definisi oprasional sendiri mempunyai tujuan

⁹ Suharsimi Ari Kunto, *Pengelolaan Sebagai Sebuah Pendekatan Evaluatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal 8.

untuk diamati, dimana berkaitan dengan kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam memperoleh data atau indikator yang menunjukkan konsep yang dimaksud. Dalam setiap ulasan laporan penelitian apapun format yang di pakai perlu penegasan pengertian yang bersifat oprasional dari setiap istilah atau konsep yang terdapat pada setiap penelitian, rumusan masalah penelitian atau tujuan penelitian. Definisi oprasional yang dimaksud adalah untuk mengidentifikasi variable-variabel penelitain kedalam bentuk yang bersifat oprasional yang menyangkut dimensi-dimensi maupun populasi dari keseluruhan obyek penelitian. Dengan ini definisi oprasional merupakan penetapan dari indikator yang akan dipelajari, diteliti dan dianalisa, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas.

Adapun serangkaian langkah-langkah prosedural dan sistematis yang menggambarkan kegiatan guna mendapatkan eksistensi empiris dari konsep. Adapun definisi operasional yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Buru Selatan:
 - a) *Struktur Birokrasi* Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pemasaran pariwisata Kabupaten Buru Selatan.
 - b) *Komunikasi* antar stakeholder dalam pengelolaan pemasaran pariwisata Kabupaten Buru Selatan.
 - c) *Sumberdaya* manusia dalam pengelolaan pemasaran pariwisata Kabupaten Buru Selatan.

d) *Disposisi* dalam pengelolaan pemasaran pariwisata Kabupaten Buru Selatan.

2. Kendala pemerintah daerah dalam pengelolaan pemasaran pariwisata di Kabupaten Buru Selatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis dalam mendapatkan informasi sesuai dengan tema penelitian. Maka pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut dengan *naturalistic inquiry* (inkuiri alamiah). Data kualitatif berada secara tersirat di dalam sumber datanya. Sumber data kualitatif adalah catatan hasil observasi, transkrip interviu mendalam (*depth interview*), dan dokumen – dokumen terkait yang dapat berupa tulisan ataupun gambar.¹⁰ Adapun langkah-langkah dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan terjun langsung ke lapangan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang telah ada saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi atau ada. Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Selain itu, jenis penelitian deskriptif juga merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggerakkan,

¹⁰ Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 63.

melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian (individu, lembaga masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.¹¹ Jenis penelitian ini kemudian digunakan untuk menjelaskan fakta dan fenomena tentang peran dinas pariwisata dalam mengelola sektor wisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Buru Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Pantai Wamsoba Desa Wali, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buru Selatan. Lokasi penelitian yang akan dituju dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buru Selatan yang bertempat di Kawasan Jalan Raya Manga Dua, Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku 97544. Lokasi ini dipilih karena lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus yang terjadi. Selain itu lokasi ini juga berdekatan dengan sektor wisata Pantai Wamsoba Yang terletak di Desa Wali. Tujuannya agar mendapat data pendukung, nantinya peneliti dapat menganalisis dan membandingkan. Sehingga peneliti memiliki beberapa data inti dan data pendukung, yang coba di aplikasikan pada penulisan pembahasan penelitian.

¹¹ Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Hlm. 63

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui terjun lapang. Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan dan original.¹² Sehingga Data primer akan diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti selama kegiatan penelitian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupate Buru Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan sifatnya sebagai pelengkap. Dalam proses penulisan skripsi ini diharapkan mendapatkan data berupa data fisik dokumen, dokumentasi, jurnal, buku, media cetak, media elektronik. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara maupun observasi langsung ke lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data yang akan mempermudah peneliti untuk meneliti dan menyelesaikan masalah. Adapun penelitian data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹² Nafi'ah, Ulin 2015, *'Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO TKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri'*, Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, hal. 17.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹³ Untuk mengetahui aktivitas dari obyek penelitian dan peristiwa-peristiwa yang mendukung tujuan penelitian. Observasi yaitu dimana peneliti sebagaimana yang mereka terjun dan saksikan secara langsung dan melihat, mendengar, yang kemudian dicatat secara subyektif mungkin, maka penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Data yang diperoleh dari observasi adalah data untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan sektor wisata di Pantai wamsoba Desa Wali Kabupaten Buru Selatan.

Menggunakan teknik pengumpulan data observasi dapat mengetahui kondisi ril yang terjadi didaerah tempat penelitian yakni Kabupaten Buru Selatan. Sejauh mana Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melaksanakan usaha untuk mengembangkan dan mengelola potensi wisata maupun budaya yang dimiliki.

¹³ Bungin, MB, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 115.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam kaitannya dengan teknik wawancara dapat ditegaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan.¹⁴ Dalam pengambilan data disini biasanya juga diikuti dengan menggunakan draft pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci atau jelasnya menggunakan draft pertanyaan dengan pihak yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan peneliti yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dibuat untuk memperkuat bukti dan data yang diperoleh dilapangan.¹⁵ Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk penelitian.¹⁶ Selain

¹⁴ Moleong, Lexy J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 135

¹⁵ Hardiansyah (2009) dalam Haris Hardiansyah (2010:143)

¹⁶ M Djuanaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, 2012, AR-RUZZ Media, Jogjakarta, hlm. 199.

dari pada itu rekapitulasi data ataupun buku harian catatan lapang peneliti serta gambar atau foto yang mendukung data penelitian. Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan pemecatan terhadap berbagai dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, peraturan maupun arsip-arsip yang tersedia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan tujuan mendapatkan bagian yang menunjang secara teoritis terhadap data penelitian. Peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan dengan dokumentasi yang bertujuan untuk menjadikan catatan atau bukti penelitian yang dilakukan baik dokumen resmi, arsip, laporan yang didapatkan langsung dari dinas terkait. Peneliti juga dapat menggunakan dokumentasi berupa foto, atau video selama kegiatan berlangsung. Melalui studi dokumentasi, informasi dapat diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

5. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yaitu seseorang yang memiliki keterangan dan informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling yang didasarkan pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajahi

obyek atau situasi yang sedang diteliti.¹⁷ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buru Selatan
- b) Masyarakat Desa Dan Pengunjung/wisatawan
- c) Staf Dinas Pariwisata dan Petugas Lokasi Wisata

6. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses penting dalam suatu penelitian, mengingat tahapan ini diperuntukkan untuk menyajikan data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung. Analisa data sering kali dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus langsung menganalisis data yang didapatkan setelah selesai melakukan wawancara, observasi, dan data dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin, yang dijelaskan sebagai berikut ini :¹⁸

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian terpadu dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Peneliti akan melakukan analisa terlebih dahulu dari data yang telah didapatkan baik itu

¹⁷ Sugiyono,2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 96.

¹⁸ *op.cit*, Hlm. 70

dari observasi langsung, wawancara ataupun data dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam pembahasan sesuai dengan judul atau tema yang diangkat oleh peneliti.

b. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Peneliti akan menarasikan informasi-informasi yang di dapatkan baik melalui wawancara maupun dengan analisa dokumen yang di dapatkan peneliti pada saat melakukan observasi.

d. Kesimpulan

Kesimpulan yaitu kegiatan akhir dari analisis data Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis

data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menela'ah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari observasi lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya melalui metode observasi langsung, wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi. Selanjutnya dengan analisis dan interpretasi data akan didapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi dan saran guna sebagai langkah penyelesaian atas permasalahan terkait.